

PENANAMAN NILAI – NILAI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL BAGI PENDIDIK

Rahman, Idi Warsah, Alfauzan Amin, Adisel

UIN Fatmawati Soekarno, IAIN Curup

Email author; rahmanumar292@gmail.com , idiwarsah@iaincurup.ac.id

Abstrak

Penanaman nilai – nilai pendidikan multicultural bagi pendidik adalah hal yang sangat utama untuk mewujudkan situasi kondisi pendidikan yang mendamaikan dan adanya sikap saling menghormati dan menghargai. Tulisan ini menyampaikan tentang bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanamkan nilai – nilai multicultural bagi peserta didik dan masyarakat secara umum. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan Library Research, yaitu penelusuran berbagai buku, artikel jurnal dan sumber lainnya yang memiliki keterhubungan dengan pendidikan multicultural. Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan. Dengan demikian pendidikan multikultural, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial. Pendidikan multikultural adalah sebuah bentuk pendidikan yang menerapkan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan ras. Dan yang paling penting, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokratis.

Kata Kunci : Pendidikan Multikultural, Pendidik

Pendahuluan

Multikultural sebenarnya relatif baru muncul sekitar tahun 1970-an. Gerakan multicultural muncul pertama kali di Kanada dan kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Australia. Kemunculan multikultural di Kanada dilatari oleh kondisi kenegaraan Kanada yang didera konflik yang disebabkan oleh hubungan antar warga negara. Masalah tersebut meliputi hubungan antar suku bangsa, agama, raas dan aliran politik yang terjebak pada dominan dan tidak dominan. Kata multikulturalisme pertama kali digunakan di Kanada tahun 1960-an. Perdana Menteri Kanada, Pierre Trudeau, menggunakannya untuk melawan konsep biculturalism. Di masa sebelumnya, Kanada dikenal hanya terdiri atas dua etnis yang saling bersaing antara Inggris dan Perancis. Semenjak Trudeau menyatakan bahwa Kanada merupakan negara multikultural karena terdiri atas etnis dan ras berbeda seperti Inggris, Perancis, Indian, Inuit, serta kaum imigran dari mancanegara seperti Cina, India, Jerman, Arab, dan sebagainya.

Munculnya wacana multikulturalisme, yang kemudian didengungkan di pelbagai aspek kehidupan manusia, didasarkan pada keyakinan bahwa dengan rekognisi dan transformasi multikultural akan mendorong nilai-nilai masyarakat toleran dan harmoni. Ini semakin menegaskan bahwa kemunculan wacana dan kemudian menjadi gerakan multikulturalisme, bukan hadir dalam ruang hampa dan tanpa setting sosial-politik dan ekonomi yang melatarbelakanginya. Memahami kemunculan multikulturalisme agaknya perlu melakukan eksplorasi ke berbagai literatur dan narasi yang dikemukakan oleh Will Kymlicka. Hal ini sangat membantu memahami akar multikulturalisme di mana sejak pertengahan 1990-an, wacana multikulturalisme muncul dan menguat di ruang publik.

Dari 1970-an hingga 1990-an, di seantero belahan dunia, terutama di Eropa yang dengan giat mengkampanyekan demokrasi. Berbarengan dengan kampanye itu secara otomatis muncul kebijakan rekognisi dan akomodasi perbedaan, melalui kebijakan multikulturalisme dan hak-hak minoritas. Kebijakan ini diikuti oleh berbagai jenjang domestik pada berbagai negara bahkan juga organisasi internasional. Dengan sendirinya kesadaran kolektif ini secara gradual menolak dan mengikis ide-ide unitaritas dan homogenisasi nationhood. Hal itu menegaskan satu kenyataan bahwa sebelum era 1970-an, ruang publik dipenuhi oleh wacana homogenisasi kebangsaan atau nationhood. Ini tentu berdampak negatif pada kelompok minoritas seperti dipersempitnya ruang untuk mengekspresikan identitas sesuai dengan suku-bangsa, agama dan status sosial.

Hal ini secara psikologis menimbulkan rasa takut dan ancaman terhadap kelompok minoritas, tetapi pada titik tertentu akan menimbulkan konflik horizontal yang bermodal besar. Merespons kecenderungan semacam itu maka wacana multikulturalisme dimunculkan kemudian ia menjadi kognisi baru yang mampu mengeleminir unity minded: sebuah nalar yang selalu tunduk pada pandangan penyeragaman lebih baik, pandangan yang pada akhirnya mengingkari diversitas dan pluralistis budaya, agama dan ras. Dapat juga dipahami bahwa kemunculan wacana ataupun lebih tepat disebut dengan kognisi multikultural merupakan respons terhadap ketakutan kelompok mayoritas, jika terlalu mengakomodir diversitas atau keragaman akan berdampak pada tradisi dan the way of life yang selama ini telah dijalankan secara paripurna. Kekhawatiran semacam ini hanya sebagai indikator dari status quo kelompok minoritas untuk mempertahankan ide-ide klasik, yang menegaskan eksistensi pluralistis seperti tradisi Denmark for the Danish.

Merespons kecenderungan ini, The Center-Left Political Movement kemudian menggalakkan kampanye multikulturalisme. Kemudian diikuti oleh berbagai partai-partai sosial demokrasi di Eropa. Partai-partai tersebut tampil dengan wacana yang lebih progresif, menekankan integrasi sipil, kohesi sosial, nilai-nilai kolektif dan “shared-citizenship.” Dalam perkembangan penekanan kognisi multikulturalisme mengalami perbedaan antara satu kelompok gerakan sosial dengan gerakan sosial lainnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari penekanan gerakan

multikultural pada upaya menumbuhkan inklusitas identitas nasional, melawan rasisme dan diskriminasi.

Seiring perkembangannya, post-Multikulturalism sering kali menawarkan pendekatan yang relatif baru dalam mendorong terlembaganya kognisi multikulturalisme seperti menghindari usaha-usaha opresif melalui homogenisasi ideologi nasionalisme. Hal ini dapat dimaklumi karena tujuan utama dari rekognisi multikulturalisme adalah muncul dan menguatnya kesadaran akan pluralistis, dengan kesadaran semacam itu masyarakat dapat menghindar dari perilaku kekerasan dan agresif yang didasarkan pada rasialisme dan diskriminasi sosial lainnya. Hal ini menjadi faktor utama mengapa gerakan rekognisi multikulturalisme selalu menempuh jalan damai, bahkan melalui pendidikan sebagai jalan terbaiknya. Ada relasi yang sangat kuat antara kemunculan multikulturalisme sebagai gerakan sosial baru (new sosial movement) dengan persoalan-persoalan anti-pluralistis dan menguatnya politik identitas.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah library research atau kajian pustaka. Penulis mengumpulkan beberapa materi yang berhubungan dengan tema tulisan dari penelusuran pustaka. Termasuk bagian analisis yang digunakan oleh penulis. Kegiatan ini bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen - dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menghindarkan terjadinya pengulangan, peniruan, plagiat, termasuk subplagiat. Dasar pertimbangan perlu disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian didasari oleh kenyataan bahwa setiap objek kultural merupakan gejala multidimensi sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali secara berbeda-beda, baik oleh orang yang sama maupun berbeda (Prastowo, 2012).

Pembahasan

Dapat dinilai bahwa multikulturalisme merupakan respons atau sebagai anti-tesis dari politik identitas yang berlebihan, sebuah sikap kolektif yang cenderung menegasikan atau berupaya menghilangkan kenyataan pluralistis, kemudian menyeret kehidupan sosial ke monostruktur dan identitas, sebuah kehidupan di mana kehendak untuk seragam lebih dominan dan perlahan menyingkirkan pluralistis. Hal ini, yang kemudian hendak dilawan atau direduksi melalui kemunculan gerakan rekognisi multikulturalisme.

Dari konteks ini pula, agaknya dapat dipahami bahwa menjadi multikultural memiliki beberapa makna atau definisi yang muncul secara empiris yakni: Dalam berbagai literatur post-multikulturalis, ditemukan makna bahwa multikulturalisme diartikan sebagai a feel-good

celebration of ethnocultural diversity, encouraging citizens to acknowledge and embrace the panoply of customs, traditions, music, and cuisine that exist in a multiethnic society, atau sebuah selebrasi perasaan positif perbedaan etnokultural, yang mendorong warga menghargai ekspresi kebiasaan, musik dan pluralistis tradisi.

Dalam konteks itu, Yasmin Alibhai-Brown memaknai multikulturalisme dengan “3S” models. Istilah itu, ia temukan ketika melakukan kajian di Inggris Raya, di mana istilah ini adalah kependekan dari: saris, samosas, dan steel drums. Multikulturalisme, dalam bentuk ini, berasal dari budaya kelompok etnik yang berciri khas lengkap dengan praktik yang otentik. Praktik otentik tersebut biasanya dapat ditemukan dan disaksikan dalam performing seperti festival, pertunjukan dalam media serta museum dan lain sebagainya. Performing ini pula menampilkan wajah-wajah multikulturalisme melalui warna dan pelbagai variasi ekspresi serta perbedaan budaya maupun nilai di dalamnya.

Dengan demikian, agaknya multikulturalisme dapat dimaknai sebagai bagian utuh dari revolusi hak-hak asasi manusia yang melibatkan keragaman etnisitas dan perbedaan ras. Ini mengandaikan satu tesis bahwa konteks hadir atau munculnya multikulturalisme merupakan produk dari penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya menerima keragaman etnis, budaya dan ras. Hanya dengan kesadaran semacam itu, harmoni sosial dan budaya dapat tercipta, hingga akhirnya menguatkan negara bangsa. Tidak berlebihan jika John Rex dan Gurharpal Singh menegaskan bahwa multikulturalisme telah menjadi isu politik yang sangat penting di negara-negara Eropa sejak tahun 1945-an.

Meskipun secara historis 25 tahun lalu multikulturalisme telah menjadi tema perdebatan antara filosof dan ilmuwan sosial. Bahkan dalam filsafat politik, pertanyaan yang muncul tampak sebagai upaya mendefinisikan karakteristik masyarakat liberal yang baik, sebuah masyarakat yang diimajinasikan sebagai entitas yang mengakui dan menjamin serta melindungi hak-hak individual. Hal ini menguatkan tesis bahwa multikulturalisme hadir sebagai sebuah gerakan rekognisi merupakan produk dari kesadaran kolektif, bahkan kesadaran individual terhadap pentingnya mengakui hak-hak individual di mana fitrahnya adalah berbeda dan pluralistik.

Perbedaan etnis, ras dan budaya bukanlah sebuah bencana tetapi sejatinya adalah modal bagi negara-bangsa (nation-state). Muhammad Ali dengan lugas menganggap paham tersebut sebagai universalitas. Dianggap universal karena dengan paham semacam itu hak-hak individual dapat hadir di ruang publik sebagai sebuah ekspresi yang dilindungi. Dalam kondisi ini kemudian individu sebagai warga negara tidak saja berperan melalui kebebasan dalam mengekspresikan hak-hak individu, tapi pada akhirnya juga akan menguatkan pondasi negara bangsa. Artinya, agama dan budaya hadir di ruang publik sebagai indikator terhadap aktifnya warga negara, juga sebagai bukti bahwa negara telah berhasil melindungi pluralistis kewargaan.

Kebijakan yang paling populer untuk meningkatkan kesadaran multikultural tersebut adalah melalui pendidikan multikultural. Hanya saja bentuk dan model pendidikan multikultural antara satu negara dan negara lain relatif berbeda. Menjadi penting mengurai model dan bentuk pendidikan multikultural di beberapa negara. Tentunya model mainstream yang tak hanya menjadi bentuk yang diadopsi oleh banyak negara berkembang, tetapi juga dari desain pendidikan multikultural yang aspek filosofisnya relatif dekat dengan konteks keindonesiaan.

Studi multikulturalisme kemudian disistematisasi serta dipopulerkan Will Kymlicka lewat dua karyanya *Liberalism, Community and Culture* yang terbit tahun 1989 serta *Multicultural Citizenship* yang terbit tahun 1995. Bagi Kymlicka, pemberian ruang bagi kalangan minoritas suatu negara tidak bisa dicapai hanya lewat jaminan hak-hak individual dalam undang-undang. Minoritas yang dimaksud Kymlicka adalah minoritas budaya yang secara praktik sosial sehari-hari harus diperhatikan keunikan identitasnya. Kymlicka bicara dalam konteks multikultural dalam satu komunitas politik (negara), yang mungkin saja terdiri atas komunitas-komunitas budaya yang berbeda.

Studi multikulturalisme condong pada studi kewarganegaraan, karena khusus mengulas sejumlah perbedaan budaya di tengah komunitas politik (negara). Kymlicka menentang pendapat individu yang hidup dalam komunitas politik otomatis merupakan bagian komunitas budaya yang sama. Secara politik, individu adalah bagian dari satu komunitas politik, tetapi dalam hal budaya ia merupakan komunitas budaya spesifik. Dalam masalah multikulturalisme ini, Kymlicka membedakan komunitas politik dengan komunitas budaya. Upaya homogenisasi budaya di suatu negara sudah kehilangan justifikasinya. Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa dalam homogenisasi budaya di negara berkategori plural society (masyarakat majemuk) yang justru terjadi adalah dominasi budaya satu atas budaya lain. Kymlicka memandang perbedaan adalah kodrat dan patutnya diterima saja. Hal penting yang perlu dicari solusinya adalah, bagaimana jalinan hubungan antar komunitas yang berbeda dapat berjalan secara harmonis. Salah satu perhatian utama seluruh karya Kymlicka adalah menyediakan kerangka liberal hanya untuk pengobatan kelompok minoritas yang terbagi menjadi dua kategori dasar yaitu : Kelompok polyethnic atau imigran, dan Kelompok minoritas nasional.

Kymlicka berpendapat bahwa kelompok-kelompok minoritas tersebut layak mendapat hak yang unik dari negara dengan sifat peran unik mereka dan sejarah dalam populasi nasional. Kelompok Polyethnic kurang layak mendapat hak-hak tersebut karena mereka datang ke negara secara sukarela dan dengan demikian memiliki beberapa tingkat tanggung jawab untuk mengintegrasikan dengan norma-norma bangsa baru mereka. Ini tidak berarti bahwa mereka tidak berhak atas hak-hak sebagai kelompok minoritas. Kymlicka berpendapat bahwa semua minoritas budaya memiliki hak untuk memilih kehidupan mereka sendiri, tetapi tidak berarti bahwa mereka tidak berhak untuk mendapatkan yang sama dari hak-hak kelompok minoritas yang berhak untuk hidup layak.

Kymlicka membuat berbagai pengecualian seperti masalah yang dihadapi oleh para pengungsi, baik dari konflik atau kemiskinan dan oleh kelompok-kelompok minoritas seperti Afrika-Amerika (warisan di Amerika jelas tidak dimulai secara sukarela) dan berpendapat bahwa kebutuhan mereka berkaitan dengan kelompok budaya hak tertentu dan harus dipertimbangkan secara khusus. Will Kymlicka merupakan salah satu ahli teori politik kontemporer yang tertarik mengembangkan teori tersebut. Pertama kali dia menekankan tentang hal ini dalam bukunya yang berjudul *Liberalism, Community and Culture* dan selanjutnya menghasilkan suatu teori yang disusun dengan cermat dalam buku *Multikultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*.

Hal itu merupakan sebuah bukti yang memaparkan suatu laporan teoritis yang berkesinambungan dan mendalam tentang sifat dan cara-cara mengatasi masalah kewarganegaraan dalam suatu masyarakat multikultural. Kymlicka mengemukakan suatu teori liberal tentang hak-hak minoritas. Kymlicka menganggap penting untuk meletakkan prinsip-prinsip dasar tentang liberalisme dan melihat hubungannya dengan tuntutan minoritas etnik dan minoritas bangsa. Dalam pandangannya, individualisme, otonomi, reaksi diri yang kritis dan pilihan merupakan inti bagi liberalisme.

Will Kymlicka cenderung tidak ingin menggunakan kata multikulturalisme dalam menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Ia lebih suka menggunakan konsep *multination* dan *polyethnic*. Konsep bangsa (*nation*) yang digunakannya lebih disamaartikan sebagai sebuah masyarakat atau pun kebudayaan tertentu yang sudah memiliki sejarah dan teritorial tempat mereka tinggal. Bangsa tadi didasarkan pada kesamaan historis serta adat istiadat yang sama. Di dunia banyak sekali negara yang memiliki banyak bangsa yang menghasilkan bentuk negara *multination*. Ia cenderung tidak menggunakan konsep *culture* dalam pembahasan negara karena konsep ini dianggap masih cenderung abstrak dan biasa digunakan hanya untuk membedakan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat.

Dengan demikian *culture* lingkupnya lebih luas. Ia mencontohkan dengan melihat pada bangsa Eropa. Kita bisa saja mengatakan bahwa negara Eropa berasal dari *culture* yang sama karena memiliki kesamaan-kesamaan dalam masyarakatnya, meskipun sebenarnya dalam tiap negara berasal dari bangsa yang berbeda. Ia juga mencontohkan pada orang-orang homoseksual yang memiliki *culture* yang sama. Sehingga ia melihat konsep *nation* atau bangsa dalam hal ini bisa lebih spesifik dalam menjelaskan fenomena dalam suatu negara karena ada unsur historis serta teritorialnya.

Dalam keadaan di mana tiap-tiap bangsa yang ada di dalam suatu negara menerima dengan sukarela persatuan sebagai sebuah kebutuhan bersama, terbentuklah *multination state*. Selain bangsa yang memang telah berada di teritorial negara tersebut dari awal, ada juga imigran yang datang sebagai penduduk di sebuah negara. Mereka datang tanpa adanya basis tempat dan

keturunan dari bangsa di negara tersebut. Negara yang memiliki kelompok imigran inilah yang disebut Will Kymlicka sebagai polyethnic.

Bagi Kymlicka, manusia merupakan “makhluk budaya” bukan dalam pengertian masyarakat terbentuk oleh budaya mereka, tetapi dalam pengertian bahwa budaya merupakan dasar yang perlu bagi perkembangan mereka sebagai manusia. Pernyataan ini berdasarkan beberapa alasan. Budaya membentuk dunia mereka, memberikan kaca mata untuk melihat diri sendiri dan orang lain, membantu membuat pertimbangan yang cerdas, peran yang berharga, memberikan pilihan yang berarti, menuntun kehidupan, mengembangkan kapasitas pilihan, dan merupakan konteks yang tidak dapat dipisahkan dari otonomi dan pilihan mereka. Budaya memberikan identitas, memberikan sumber identifikasi dan rasa memiliki, memfasilitasi ide agar mudah dimengerti satu sama lain, mengembangkan solidaritas, dan memperkuat ikatan antar generasi.

Argumen pertama menekankan pembentukan otonomi dan argumen kedua menekankan pembentukan peran komunitas budaya. Walaupun kedua fungsi budaya itu penting tetapi keduanya tidak sama. Yang satu menekankan pembentukan peran komunitas budaya dan dinilai dari kemampuannya untuk membangun ikatan solidaritas antar anggota dari generasi yang berbeda, menanamkan semangat perhatian dan loyalitas bersama, mengembangkan rasa kepercayaan dan kesatuan yang kuat dan sebagainya, yang lain memberikan perhatian lebih besar pada pembentukan otonomi dan kemampuannya untuk menciptakan rasa kemandirian, semangat yang kuat dan pilihan yang kritis.

Seperti kaum liberal pada umumnya, Kymlicka memilih pandangan yang kedua. Baginya otonomi merupakan nilai liberal yang pokok dan budaya penting sebagai suatu konteks pilihan dan tempat lahirnya otonomi. Teori liberal Kymlicka tentang budaya memiliki implikasi penting. Budaya tidak memiliki nilai intrinsik, nilainya sebagian besar bersifat instrumental karena memberikan kapasitas bagi individu untuk membuat pilihan-pilihan yang cerdas. Budaya mendorong otonomi lebih baik dibandingkan yang lain. Budaya harus tetap terbuka bagi pengaruh-pengaruh budaya lain dan tidak membatasi ide-ide ataupun tidak memaksakan penyensoran. Suatu komunitas budaya tidak bisa menghalangi anggotanya yang menentang keyakinan yang ada dan berkeinginan mempraktikkan cara hidup yang berbeda.

Bagi Kymlicka, walaupun para individu memiliki suatu hak keanggotaan budaya namun hak tersebut tidak sama pada semua minoritas. Hak untuk keanggotaan budaya sepenuhnya hanya milik minoritas nasional karena terkonsentrasi secara wilayah memiliki struktur budaya yang cukup lengkap dan sering kali dilindungi oleh perjanjian-perjanjian. Argumennya adalah tidak seperti komunitas mayoritas nasional yang budayanya terwujud dalam institusi-institusi besar masyarakat dan menikmati kekuasaan dan martabat yang besar, minoritas nasional sering kali dirugikan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya dan memerlukan hak-hak yang sesuai untuk menyamakannya dengan komunitas mayoritas. Bagi minoritas nasional, institusi-institusi liberal

hanya dapat berfungsi jika keyakinan liberal telah diinternalkan oleh para anggota komunitas yang bersangkutan.

Pendidikan Multikultural

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan pendidikan berbasis multikultural adalah: Kedamaian merupakan keselarasan amalan yang bersifat vertikal (habluminAllah) dan nilai-nilai horizontal-kemanusiaan, agar terhindar dari kehinaan. (habluminannas), sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hujuraat ayat ke 13:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Peran guru dalam proses belajar mengajar sangat besar karena guru tidak hanya sebagai pengajar lagi tetapi guru juga sebagai pembimbing, pelatih, dan pemberi motivasi yang berguna untuk masa depan siswa. Selain itu, guru harus memiliki sikap yang baik karena secara tidak langsung siswa akan meniru sikap tersebut. Pesan utama yang terkandung dalam ayat di atas adalah keragaman jenis kelamin, individu, suku dan bangsa adalah untuk saling mengenal. Sikap yang ditimbulkan oleh komitmen untuk saling mengenal tersebut merupakan sikap positif konstruktif yang bersifat aktif. Berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat dipahami bahwa dengan mengenal diri pada orang lain pada komitmen di atas, maka terjalinlah saling pengertian akan perilaku, keinginan, kelebihan dan kekurangan masing-masing individu, suku atau bangsa. (Rinda Kurnianingrum: 2018).

Pendidikan multikultural merupakan salah satu bentuk pendidikan dengan menghargai bentuk perbedaan kebudayaan yang ada dalam lingkungan di Sekolah. Keragaman kebudayaan yang ada di Sekolah ini dilihat dari keragaman anak yang berasal dari keturunan yang tidak semata-mata dari satu keturunan suku, akan tetapi ada siswa yang berasal dari keturunan dari suku Jawa, Minang, Batak dan lain-lain. Keanekaragaman dari suku membuat keanekaragaman, mulai dari kebiasaan dalam pergaulan yang terjadi dalam pergaulan antar siswa, selain itu juga adanya perbedaan di antara siswa. Perbedaan antar agama tersebut tidak membuat permusuhan diantara siswa, akan tetapi siswa terlihat akrab.

Perlu dicari strategi dalam memecahkan persoalan tersebut melalui berbagai bidang: sosial, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan. Pendidikan yang ada di Indonesia merupakan pendidikan yang berada di titik yang tepat sebagai pondasi awal dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya kebersamaan dan keadaan riil nantinya dimasyarakat yang beragam. Siswa yang berasal dari kultur beragam, seperti perbedaan agama, strata sosial, kebiasaan dan asal kelahiran siswa. Melalui pendidikan multicultural yang mengedepankan nilai-nilai perbedaan kultur dan lewat pembelajaran secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler diharapkan tidak ada perselisihan antara minoritas dengan mayoritas dan terciptanya rasa toleransi serta kesetaraan antar perbedaan budaya maupun kebiasaan dari setiap siswa.

Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan (dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi dan kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun Negara. Tulisan ini akan menguraikan wacana tafsir yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk mengembangkan pendidikan tersebut di kalangan umat yang mau tidak mau harus melakukan transformasi menjadi masyarakat demokratis. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa inti dari pendidikan multikultural sebua ide untuk menyampaikan petingnya keberagaman budaya dan etnis dalam kehidupan baik dalam kelompok masyarakat maupun bernegara.

Pendidikan berwawasan multikulturalisme adalah proses pendidikan yang komperhensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain sebagainya) yang terrefleksikan diantara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Menurutnya, pendidikan berwawasan multikulturalisme ini haruslah melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan diantara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar. Berdasarkan uraian diatas dengan adanya pendidikan berwawasan multikultural ini bertujuan untuk melawan atau menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah, masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain sebagainya.

Hakekat Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologi multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya) dan isme (aliran atau paham). Oleh sebab itu, multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Oleh karenanya, konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Menurut Primi Rohimi, terminologi multikulturalisme tidak semata-mata menyangkut tentang keragaman kebudayaan, tetapi juga

mencakup tentang mengakui, melindungi keragaman budaya yang ada berdasarkan keragaman etnis, dan menyetarakan derajat dari kebudayaan dan nilai yang berbeda-beda. Penekanannya terletak pada pemahaman dan upaya untuk menerapkan, mempertanyakan dan belajar dari pihak lain yang berbeda serta hidup dalam konteks perbedaan sosial-budaya, baik secara individual maupun kelompok.

Multikultural dalam konsep Bhikhu Parekh adalah sebagai suatu fakta adanya perbedaan kultur dan multikulturalisme merupakan tanggapan atau respons normatif terhadap fakta tersebut. Sementara itu, Tilaar membagi pengertian multikulturalisme dalam dua pengertian yang sangat kompleks yakni “multi” yang berarti plural dan “kulturalisme” berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis karena yang plural bukan saja mengakui yang berjenis, tetapi sekaligus mempunyai implikasi-implikasi terhadap kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat. Plural juga berkenaan dengan hak-hak hidup masyarakat dalam suatu komunitas. Komunitas tersebut mempunyai budaya masing-masing.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa pengertian multikulturalisme dibedakan berdasarkan perkembangan kajian multikulturalisme yakni: pengertian pertama multikulturalisme mempunyai dua ciri utama yakni kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*) dan legitimasi keragaman budaya atau pluralisme.

Sementara pengertian kedua telah mengalami perkembangan dengan menampung berbagai jenis pemikiran baru yakni: Pengaruh studi kultural (*cultural studies*) yang melihat secara kritis tentang masalah-masalah yang esensial dari kebudayaan kontemporer, seperti pentingnya memelihara identitas kelompok, distribusi kekuasaan, peranan kelompok masyarakat yang termarginalkan, feminimisme, toleransi antar kelompok dan agama. Postkolonialisme yang mengungkit kembali nilai-nilai indigenous dalam budaya sendiri dan berupaya untuk melahirkan kembali kebanggaan terhadap budaya asing pasca terjadinya penjajahan terhadap bangsa sendiri. Globalisasi yang kadang memiskinkan potensi budaya asli.

Oleh sebab itu dibutuhkan revitalisasi budaya-budaya daerah. Feminisme dan postfeminisme yang pada awalnya merupakan gerakan untuk mencari kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang ke arah kemitraan yang sejajar antara laki-laki dengan perempuan. Teori ekonomi politik neo-marxisme yang merupakan upaya untuk melakukan hegemoni terhadap kelompok marginal tanpa melakukan revolusi atau pemaksaan terhadap kelompok-kelompok marginal tertentu. Post-strukturalisme yang menekankan perlunya melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap struktur sosial masyarakat yang telah mapan untuk bersama-sama membangun struktur sosial yang sama pula.

Sementara itu, Zakiyudin memahami bahwa pengertian multikulturalisme agak samar karena di satu sisi adanya keinginan yang jelas untuk mengatakan bahwa kebudayaan-kebudayaan lain adalah baik atau setidaknya mengandung kebaikan yang dapat dipelajari, tetapi pada waktu lain masyarakat kerap salah memberikan penilaian terhadap kebudayaan lain, suatu konstruksi pemahaman yang berdasarkan pada informasi yang tidak akurat dan tidak memadai.

Pengkritik multikulturalisme menganggap bahwa ideologi ini merupakan agenda politik yang jahat. Penilaian tersebut muncul dari pengalaman masa lampau dan juga sikap protektif terhadap pengaruh kebudayaan-kebudayaan lainnya.

Di antara tema-tema yang dianggap berbahaya adalah : Penerimaan terhadap kebiasaan menyimpang homoseksual. Penyimpangan ini disebut sebagai perbedaan, sehingga posisinya disamakan dengan perbedaan budaya lainnya. Penempatan agama sebagai salah satu aspek kultur. Konsekuensinya, Islam tidak boleh diajarkan sebagai satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Lebih jauh lagi, keyakinan untuk beragama disejajarkan dengan keyakinan untuk tidak beragama (ateisme) dan tata pelaksanaan agama disejajarkan dengan upacara adat. Artinya, menjadi ateis dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati. Demikian pula upacara adat, walaupun mengandung unsur ‘kemusyrikan’ namun perlu dilestarikan.

Pandangan di atas memperlihatkan bahwa makna, respons, dan kritik terhadap multikulturalisme bergantung pada perspektif individu yang memahaminya. Secara implisit pertentangan pandangan ini muncul karena multikulturalisme lebih dilihat sebagai ideologi dari pada kenyataan budaya plural yang hidup dalam masyarakat. Untuk memahami multikulturalisme dibutuhkan alternatif pemaknaan tentang ideologi. Pandangan Antonio Gramsci dan Michel Bhaktin bisa menjadi bagian penyejuk atas kekhawatiran kelompok yang mengkritik multikulturalisme sebagai ideologi yang menyesatkan. Yakni, ideologi lebih merupakan masalah “partisipasi” daripada “dominasi” atau “manipulasi” yang dalam arti luas lebih merupakan “pandangan dunia” dari pada propaganda partisan.

Terlepas dari dua sikap yang berbeda di atas, multikultural adalah sebuah fakta yang tak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat yang majemuk untuk mengakomodir berbagai kepentingan, dan dibutuhkan pandangan yang lebih terbuka untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing komunitas. Gagasan pendidikan multikultural yang muncul di Barat tentu saja tidak serta merta harus diadopsi secara mentah/utuh tetapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia. Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan cara pandang kehidupan manusia.

Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari aneka ragam kebudayaan. Artinya, perbedaan menjadi asas dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan

multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara. Multikulturalisme sebagai konsep pembudayaan memiliki perbedaan dengan pluralisme. Dalam multikulturalisme terdapat beberapa konsep yang mendasari paham ini, di antaranya: Keinginan manusia untuk diakui (recognition) atas hak hidup kelompok dalam masyarakat dengan kebudayaannya yang khas. Hal ini berkaitan erat dengan persoalan identitas di mana setiap orang perlu diakui akan keunikan identitasnya, dan identitas ini perlu dijaga hak-haknya agar tidak diasimilasi oleh identitas mayoritas yang dominan. Kesamaan martabat manusia (equal dignity of human rights) sebagai prinsip hidup manusia yang dijadikan dasar untuk menerapkan keadilan bagi masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya. Hal yang penting untuk saling menghargai dan menghormati dan merupakan hak manusia dalam kemerdekaan.

Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki perbedaan dan mengakui kesamaan hak dalam ruang publik yang relatif adil untuk berekspresi bagi semua kelompok termasuk minoritas bahkan kelompok oposisi. Dalam masyarakat plural hal ini belum tentu ada dan sistem tersebut belum tentu dapat memberikan jaminan untuk ini. Keberagaman memang ada dalam masyarakat plural tetapi masih terdapat di dalamnya dominasi dan hegemoni dari kelompok mayoritas dan etnis elite. Sementara paham multikulturalisme memberikan pemahaman kepada seluruh komponen masyarakat bahwa hidup ini tidak hanya plural dari berbagai aspek kehidupan manusia tetapi juga bagaimana pemahaman multikulturalisme memberikan porsi pengakuan terhadap perbedaan dan memberikan ruang yang cukup bagi setiap komunitas untuk mengekspresikan dan mempertahankan eksistensi masing-masing.

Kesimpulan

Multikulturalisme sebuah filosofi terkadang juga ditafsirkan sebagai ideologi, namun yang pasti itu adalah sebuah konsep tentang upaya yang menghendaki adanya persatuan dan berbagai kelompok kebudayaan yang saling berbeda dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Multikulturalisme juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara bangsa sejak awal abad ke 19. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai politik rekognisi di mana secara fundamental merupakan sebuah ide keadilan yang menekankan pada hak-hak individual dan kelompok yang secara kultural berbeda dan saling terhubung untuk menghadapi tekanan kelompok dominan terhadap minoritas dalam hubungannya dengan perbedaan kultural mereka. Hal ini bermakna bahwa multikulturalisme adalah gerakan social yang bertujuan agar perbedaan tidak menjadi sesuatu yang politis dan berdampak pada terpinggirkannya kelompok minoritas dalam struktur sosial, politik dan ekonomi. Multikulturalisme merupakan norma teoritis terhadap hak minoritas yang bermuatan ideologi politik dari sebuah bangsa yang secara umum mempertimbangkan kewarganegaraan dan identitas etnis. Ia juga meliputi ideologi untuk melindungi masyarakat dalam tatanan demokrasi.

Daftar Pustaka

- Firdaus, dkk, Pendidikan Berkualiti ke arah Pembentukan Nilai dan Peningkatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, (Sumatera Barat: Oktober 2015), ASEAN Comparative Education Research Network Conference, h. 1758.
- Kamaril, Cut. "Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Pendidikan Multikultural." Makalah UNJ Jakarta, 2004.
- Koenjtaraningrat. Sejarah Teori Antropologi I. Jakarta: UI Press, 1987.
- Kymlicka, Will dan Wayne Norman. *Citizenship in Diverse Societies*. Oxford: Oxford University Press, 2003.
- Kymlicka, Will. ed. *Multikultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford dan New York: Oxford University Press, 1995.
- Kymlicka, Will. ed. *Politics in The Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Kymlicka, Will. ed. *The Rights of Minority Cultures*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Leaman, Oliver. "Book Reviews : Hick and Nasr on Pluralism." *The Expository Times* (1999).
- Leiner, Dominik J. "Convenience Samples from Online Respondent Pools: A Case Study of SoSci Panel." Working Paper (13 Januari 2014).
- Lestari, R. Suci. "Persepsi Remaja terhadap Pembagian Peran Gender dalam Keluarga: Studi pada Siswa Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Kota Bogor." Skripsi, IPB, 2018.
- Leung, Angela Ka-yee dan William W. Maddux. "Multicultural Experience Enhances Creativity." *American Psychologist* 63, no. 3 (2008).
- Munawar & Husin, 2005, Pendidikan Multikultural dalam Al-Quran, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga: 2018), h. 5.
- Neil Bissondath, 2002, Multikulturalisme dan Politik Anti Kekerasan, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 2 No.2, h. 3.
- Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rinda Kurnianingrum, Penanaman Sikap Sosial Melalui Pembelajaran IPS Kelas V di SD Negeri Pengkol, (Pengkol : UNY, 2018), *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Edisi 23 Tahun ke-7*, h. 3.

